



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

JEJAK PERJUANGAN FPKS

DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

FPKS
DPR RI
**POTONG
GAJI
7 KALI**

- 1 Bencana Alam
Di Sejumlah Daerah
- 2 Penanganan
Pandemi Covid 19
- 3 Membantu Warga
Terdampak
- 4 Tebar 1 Juta Qurban
- 5 Paket 1,7 Juta Paket
Sembako



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

FPKS DPR RI TOLAK RUU IBUKOTA NEGARA

IKN bukan solusi,
tapi menjadi beban
baru bagi negara

- 1 Proses pengambilan keputusan IKN tidak transparan, sentralistik, dan tanpa kajian terbuka yang dapat dipelajari publik
- 2 Kondisi krisis kesehatan akibat pandemi menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif dan belum stabil untuk menyokong pembiayaannya. Diperkirakan total kebutuhan dana untuk membangun ibu kota baru sebesar Rp466 triliun, padahal keluhan Tenaga Kesehatan terkait honor yang belum dibayarkan serta kisruh utang BPJS ke fasilitas kesehatan defisit di tahun 2020 masih sebesar Rp44 triliun.
- 3



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

FPKS DPR RI BERHASIL PERJUANGKAN SUBSIDI ENERGI UNTUK TA 2022

- 1 subsidi BBM tetap berlanjut
- 2 Subsidi LPG 3 kg tetap berlanjut, bahkan bertambah quotanya
- 3 Subsidi listrik tetap berlanjut, juga ada subsidi pemasangan listrik baru 450 VA.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

FPKS
DPR RI
**TOLAK RUU
KUP/HPP**

PKS menolak kenaikan tarif PPN (pajak pertambahan nilai) dari yang sekarang 10% menjadi 12%.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

FPKS
DPR RI
**TOLAK
RUU HIP**

Fraksi PKS satu-satunya Fraksi yang sejak awal tegas bersikap soal RUU ini. Kami mempelajari dengan cermat Naskah Akademik maupun pasal-pasal RUU dan menyimpulkan bahwa RUU bermasalah secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Konstruksinya mengarah pada reduksi makna sila-sila Pancasila yang utuh yang disepakati dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

FPKS
DPR RI
**TOLAK
RUU CIPTA
KERJA**

Fraksi PKS menolak karena berpandangan RUU Cipta Kerja harus lebih mendalam dibahas. Pasalnya arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Badan Legislasi DPR RI

FPKS
DPR RI
**TOLAK
KENAIKAN
BEA MATERAI
JADI RP10.000**

Fraksi PKS berpendapat kebijakan bea meterai tarif tunggal Rp10.000 yang naik 70 persen dari Rp6.000 serta batas transaksi dengan nilai nominal hanya di atas Rp5 juta masih menciderai asa dan filosofi keadilan pajak karena objek pemeteraian ini adalah semua dokumen baik kertas maupun elektronik kecuali yang disebutkan dalam pasal 7 dan 22.



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

FPKS
DPR RI
**TOLAK
PERPRES
INVESTASI
INDUSTRI
MIRAS**

"Bagaimana mungkin ditengah maraknya kasus kriminalitas, kecelakaan, kekerasan dan dampak negatif lainnya karena miras, justru Pemerintah membuka dan melegalkan Industri minuman Keras Mengandung alkohol dan Industri minuman mengandung alkohol (anggur) dalam daftar bidang usaha? Walaupun dengan menyertakan persyaratan tertentu,"



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

FPKS
DPR RI
**DORONG
PANSUS
JIWASRAYA**

Penyelesaian skandal PT Jiwaseraya yang telah merugikan keuangan negara lebih Rp 13,7 triliun harus dilakukan secara komprehensif, tidak parsial. Penyelidikan secara komprehensif itu hanya bisa dilakukan melalui Pansus Hak Angket.



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

FPKS
DPR RI
**TOLAK
VAKSIN
BERBAYAR**

Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

FPKS DPR RI TOLAK KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN

“Kenaikan iuran BPJS yang mulai diberlakukan ini sangat mengecewakan, karena Pemerintah mengabaikan keputusan yang sudah dibuat bersama dengan DPR



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

FPKS

DPR RI

DORONG RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DISAHKAN

RUU PDP harus segera diselesaikan agar data rakyat terlindungi dan hambatan utama mengenai lembaga pengawas harus bersifat independen, memiliki otoritas mengawasi, menyelidiki, menengahi masalah antara pemilik dan pengguna data hingga memutuskan perkara sengketa data.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

FPKS
DPR RI
**DORONG PTKP
8 JUTA TIDAK
KENA PAJAK**

PKS memperjuangkan agar PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) naik dari Rp. 4.5 juta menjadi Rp. 8 juta. Namun ditolak Pemerintah. PTKP 4.5 juta tersebut sudah 5 tahun tidak bertambah.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

FPKS
MPR RI
**TOLAK USULAN
PERPANJANG
MASA JABATAN
PRESIDEN**

PKS menegaskan memperpanjang masa jabatan sudah tidak relevan lagi dilakukan di era sekarang. Sebab ketentuan UUD NRI 1945 sangat jelas dan tegas serta demokrasi sudah makin tumbuh dan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi makin meningkat.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

FPKS
DPR RI
**DORONG PEMERINTAH
MENUTUP PERJALANAN
INTERNASIONAL
SELAMA PPKM
DARURAT**

Pemerintah diminta tidak memikirkan urusan bisnis terlebih dahulu. Hal ini karena jika kesehatan masyarakat membaik, maka ekonomi dapat berangsur pulih.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

FPKS
DPR RI
**TOLAK IDE
PENGHAPUSAN
PENDIDIKAN AGAMA
DI SEKOLAH**

ide sekularisasi yang menjauhkan generasi bangsa dari nilai-nilai agama bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan tujuan pendidikan nasional yang sangat menekankan nilai-nilai pendidikan agama di sekolah.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Anggota Komisi X DPR RI

FPKS
DPR RI
**TOLAK RENCANA
RENOVASI DUA
RUANGAN KEMEN-
DIKBUDRISTEK
6.5 MILIAR**

Renovasi ruangan dengan anggaran sebesar itu bukan prioritas saat ini. Seharusnya Mendikbudristek lebih fokus mencari terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak bangsa



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

FPKS
DPR RI
**INGATKAN
PENYERANGAN
TOKOH AGAMA
TIDAK BOLEH
DIREMEHKAN**

PKS menegaskan tindakan penyerangan kepada ustazd maupun tokoh agama tidak boleh dianggap remeh, Peristiwa tersebut jangan sampai sampai terulang lagi.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

FPKS DPR RI MINTA PEMERINTAH SERIUS BERANTAS NARKOBA

PKS meminta aparat hukum lebih serius lagi dalam melakukan pemberantasan narkoba. Mengingat selama ini penyebaran yang terjadi sangat masif dan jumlahnya semakin besar. Negara harus hadir dalam hal menangani narkoba, mencermati kinerja pemberantasan narkoba tidak maksimal.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI

FPKS DPR RI **INGIN ANCAMAN PENJARA DALAM RKUHP BAGI PELAKU ZINA DIPERBERAT**

PKS ingin substansi ancaman pidana pasal perzinahan dikembalikan ke draf awal, di mana ancaman pidana bagi pelaku lebih berat.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Komisi I DPR RI

FPKS

DPR RI

PROTES PERTANYAAN TWK KPK 'PILIH PANCASILA ATAU ALQURAN?

Niat BKN untuk memerangi radikalisme agama berubah menjadi kebijakan terorisme agama, khususnya umat Islam yang dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau Alquran. Seakan akan orang yang memilih Alquran dia tidak pancasilais



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

TEDDY SETIADI, S.Sos.

Anggota Komisi II DPR RI

FPKS
DPR RI
**MINTA PEMERINTAH
HARUS SERIUS
PERHATIKAN GURU
HONORER**
yang Mengabdikan
untuk Negeri

Guru honorer bukanlah para pencari kerja seperti halnya mereka yang baru lulus. Namun para guru honorer adalah mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun, mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa. Oleh karenanya mereka perlu mendapatkan perhatian khusus



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH

Anggota Komisi III DPR RI

FPKS DPR RI **DORONG PRESIDEN BIKIN PERPPU REVISI UU ITE**

PKS mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU ITE. PKS beralasan proses revisi UU ITE akan memakan waktu cukup lama. Perppu untuk sementara bisa digunakan mengganti sejumlah pasal karet yang membungkam kebebasan berpendapat, kritik, dan kemerdekaan pers



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

FPKS DPR RI **NILAI PEMERINTAH BELUM HADIRKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI**

Indonesia memiliki 86,98% dari total desa yang punya potensi dan penghasilan utama sektor Pertanian namun kebijakan nasional tidak menempatkan Pertanian sebagai prioritas pembangunan. Bersama dengan itu impor beras terus meningkat setiap tahun. Namun biaya produksi beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya sehingga petani Indonesia belum sejahtera.



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI



PKS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

FPKS
DPR RI

**KECAM PERNYATAAN
PEJABAT YANG
DISKRIMINATIF
TERHADAP PAPUA**

Menyayangkan sikap dan cara berfikir pejabat negara seperti Mensos, yang masih menempatkan wilayah Papua sebagai tempat buangan. Seakan-akan ada kelompok yang superior dan ada yang inferior. Itu tidak etis dalam mengelola negara



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



MAHFUDZ ABDURRAHMAN

H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Komisi VI DPR RI

FPKS
DPR RI
**DUKUNG
PENGUATAN
UMKM**

Setiap pemangku kepentingan harus bersama-sama membangun ekosistem usaha ultra mikro yang tangguh dengan jaringan yang kuat, salah satu caranya adalah dengan digitalisasi usaha dari tingkat ultra mikro.